

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu agenda pokok dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat serta keseimbangan pembangunan nasional. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan akumulasi nilai tambah dari seluruh produk barang maupun jasa yang diproduksi oleh berbagai unit aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah pada kurun periode waktu tertentu. Dengan demikian, Produk Domestik Regional Bruto tidak hanya berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan tingkat aktivitas ekonomi dan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan nilai tambah.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mampu menggerakkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja serta penguatan kapasitas pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, dinamika PDRB menjadi aspek yang krusial dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menetapkan sektor-sektor prioritas yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses meningkatnya kapasitas suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam jangka

panjang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu fokus utama makroekonomi yang sangat bergantung pada kemampuan suatu wilayah dalam memperluas dan meningkatkan kualitas faktor-faktor produksinya. Menurut Sukirno (2001), peningkatan kapasitas produksi ini berlangsung seiring dengan bertambahnya modal, tenaga kerja, pengetahuan, serta kemajuan teknologi. Peningkatan faktor-faktor produksi tersebut pada akhirnya akan tercermin dalam peningkatan PDRB suatu

Ditinjau dari tujuan penggunaannya, kredit perbankan dapat dikelompokkan terbagi atas kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi rumah tangga. Kredit modal kerja berperan dalam memastikan kelancaran operasional usaha dan mendorong peningkatan output produksi jangka pendek, yang secara langsung memengaruhi nilai tambah sektor-sektor ekonomi dan PDRB. Kredit investasi memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas produksi jangka panjang melalui pengadaan barang modal dan perluasan usaha, sehingga turut berdampak pada pertumbuhan PDRB secara berkelanjutan. Sementara itu, kredit konsumsi rumah tangga berpotensi memperkuat daya beli masyarakat dan permintaan agregat, yang pada akhirnya menggerakkan peningkatan produksi dan PDRB.

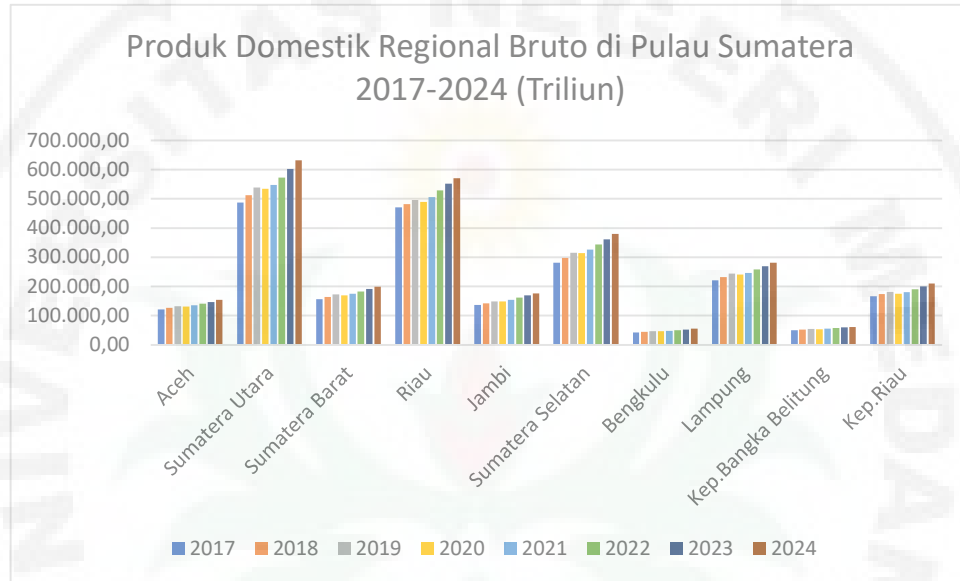
Pulau Sumatera merupakan salah satu kawasan strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB nasional. Struktur perekonomian Pulau Sumatera didominasi dari sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa. Namun demikian, kontribusi PDRB antarprovinsi di Pulau Sumatera memperlihatkan kesenjangan yang cukup nyata. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan dalam

struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, kualitas infrastruktur, serta keterjangkauan akses terhadap sumber pembiayaan, khususnya kredit perbankan.

Perkembangan PDRB di Pulau Sumatera tidak terlepas dari peran sektor-sektor unggulan dan ketersediaan pembiayaan dalam menopang aktivitas ekonomi. Provinsi yang memiliki sektor industri pengolahan yang kokoh serta jangkauan akses kredit perbankan yang lebih luas cenderung mencatatkan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan provinsi yang masih bertumpu pada sektor primer dan menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi dan pemanfaatan kredit perbankan berpotensi menjadi salah satu faktor penentu variasi PDRB antarprovinsi di Pulau Sumatera.

Secara umum, peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto ditopang oleh beragam bidang usaha pendukung, antara lain 3 sektor Industri Manufaktur, Perhotelan dan Kuliner, serta Layanan Keuangan, di samping diperkuat oleh peningkatan kinerja ekspor ke luar negeri. Terdapat lima sektor strategis yang dapat ditempuh untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, yakni penerapan pendekatan pengolahan hasil di bidang pertanian, pemajuan sektor kepariwisataan, penguatan daya pikat penanaman modal pada sektor yang memiliki potensi besar, percepatan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi peran 3 sektor keuangan dan perbankan (Widijarto, 2024). Berikut ini disajikan Gambar 1.1 yang memaparkan kondisi Produk Domestik Regional Bruto di wilayah Pulau Sumatera.

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera. selama periode 2017–2024 memperlihatkan dinamika yang beragam antarprovinsi. Secara umum, nilai PDRB di seluruh provinsi cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat pelambatan pada tahun-tahun tertentu. Dalam rentang waktu tersebut, Sumatera Utara secara konsisten tercatat sebagai provinsi dengan PDRB tertinggi di Pulau Sumatera. Nilai PDRB Sumatera Utara meningkat dari 487.531 triliun di tahun 2017 hingga mencapai 632.534 triliun di tahun 2024. Tingginya PDRB Sumatera Utara mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah yang ditopang oleh struktur perekonomian yang relatif terdiversifikasi, terutama dari sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan. Selain itu, posisi Sumatera Utara sebagai sentra

pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang di kawasan barat Indonesia turut menopang kinerja PDRB provinsi ini.

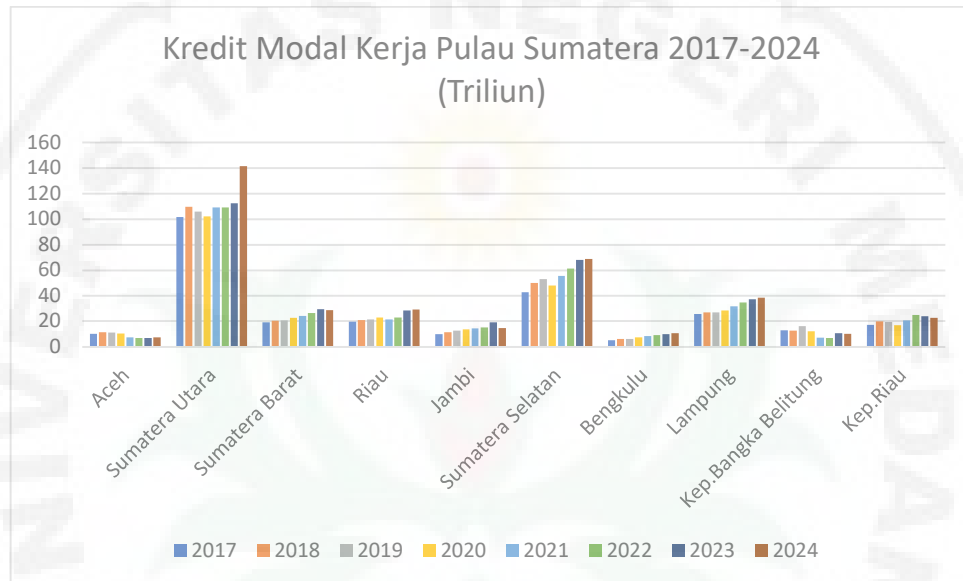
Sebaliknya, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan PDRB terendah di Pulau Sumatera sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2017, PDRB Bengkulu tercatat senilai 42.073 triliun dan bertumbuh hingga mencapai 54.454 triliun di tahun 2024.. Meskipun memperlihatkan tren peningkatan, pertumbuhan PDRB Bengkulu relatif lebih lambat dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Rendahnya PDRB Bengkulu disebabkan oleh terbatasnya skala aktivitas ekonomi serta rendahnya nilai tambah yang dihasilkan. Struktur perekonomian Bengkulu masih bergantung pada sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan berskala kecil, dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang belum cukup berarti. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur, rendahnya tingkat investasi, serta akses pembiayaan perbankan yang relatif terbatas turut menghambat pengembangan sektor-sektor produktif.

Perbedaan perkembangan PDRB antara Sumatera Utara dan Bengkulu mencerminkan adanya ketimpangan kapasitas ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa peningkatan PDRB tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi, melainkan juga oleh struktur ekonomi, tingkat industrialisasi, serta dukungan infrastruktur dan pembiayaan. Provinsi yang memiliki fondasi ekonomi lebih kokoh serta jangkauan akses pendanaan yang lebih luas cenderung mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan berkesinambungan dibandingkan provinsi yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, kesenjangan PDRB antarprovinsi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi regional juga dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan. Perbankan memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga intermediasi yang mendistribusikan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang memerlukannya (Mulyati, 2015). Melalui fungsi intermediasi tersebut, perbankan diharapkan dapat mendukung peningkatan aktivitas.

Penyaluran kredit perbankan terdiri atas beberapa jenis dengan fungsi yang beragam. Kredit modal kerja dimanfaatkan untuk mendanai keperluan operasional bisnis seperti pengadaan bahan baku dan pembayaran gaji, kredit investasi dimanfaatkan untuk pengadaan barang modal seperti mesin. dan gedung yang memberikan dampak jangka panjang terhadap kapasitas produksi, sedangkan kredit konsumsi rumah tangga digunakan untuk pembelian properti dan barang konsumsi seperti rumah dan kendaraan. Pertumbuhan penyaluran kredit yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi karena bank menyalurkan dana dalam jumlah lebih besar kepada masyarakat dan dunia usaha, yang pada muaranya menggerakkan peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi (Prawira & Wisadha, 2010). Dengan demikian, perbedaan penyaluran kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. rumah tangga ditengarai menjadi salah satu unsur yang memengaruhi perbedaan perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera selama periode 2017–2024.

Gambar 1.2 Kredit Modal Kerja di Pulau Sumatera 2017-2024



Sumber: Data Bank Indonesia, Statistik Keuangan Daerah

Berdasarkan data kredit modal kerja di Pulau Sumatera periode 2017–2024, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan nilai kredit modal kerja tertinggi, sementara Provinsi Bengkulu merupakan provinsi dengan nilai kredit modal kerja terendah sebagaimana tergambar dalam diagram. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan aktivitas ekonomi dan kemampuan penyerapan pembiayaan perbankan antar wilayah di Pulau Sumatera..

Provinsi Sumatera Utara mencatatkan nilai kredit modal kerja terbesar di Pulau Sumatera pada periode 2017–2024. Sumatera. Sumatera Utara menjadi lokasi yang diminati oleh para pelaku usaha berkat kuatnya lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan yang terkonsentrasi di Kota Medan dan kawasan sekitarnya. Selain itu, Sumatera Utara memiliki jumlah pelaku usaha dan UMKM yang besar sehingga kebutuhan pembiayaan operasional

usaha relatif tinggi dan mendorong meningkatnya permintaan kredit modal kerja, terutama pada periode pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kredit modal kerja di Sumatera Utara memperlihatkan tren peningkatan yang cukup signifikan dengan dukungan perbankan berupa kemudahan akses pembiayaan dan program pengembangan UMKM, yakni dari Rp101,66 triliun di tahun 2017 hingga mencapai Rp141,49 triliun di tahun 2024. Keseluruhan faktor tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan nilai kredit modal kerja tertinggi di Pulau Sumatera.

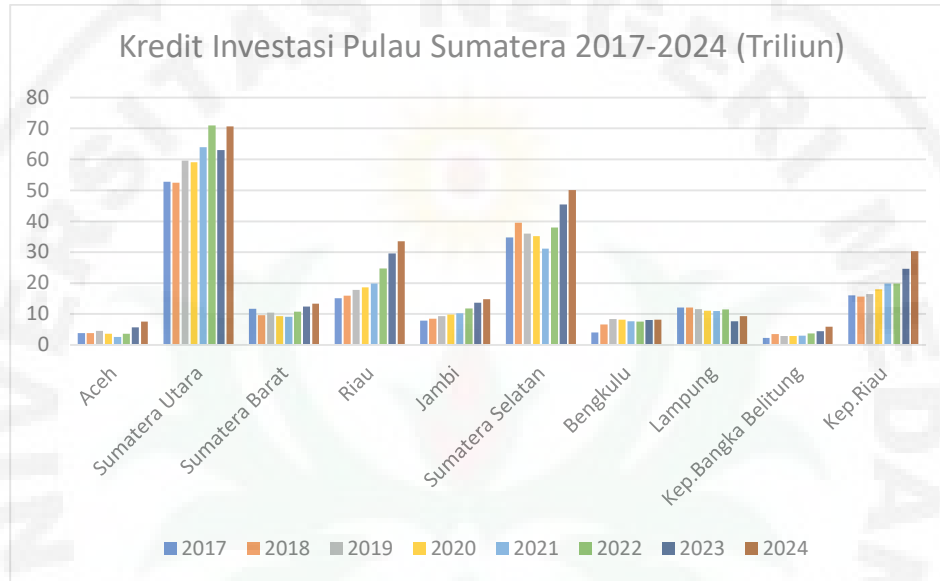
Adapun Provinsi Bengkulu mencatatkan nilai kredit modal kerja terendah di Pulau Sumatera. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdampak pada perkembangan sektor pembiayaan di wilayah tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya skala ekonomi di daerah ini. Perekonomian Bengkulu lebih bertumpu pada sektor pertanian dan perdagangan berskala kecil yang memiliki kapasitas produksi dan kebutuhan pembiayaan yang relatif terbatas, serta ditandai oleh sektor industri pengolahan yang belum berkembang secara optimal. Di samping itu, meskipun mengalami kenaikan dari Rp4,06 triliun di tahun 2017 hingga mencapai Rp10,75 triliun di tahun 2024., keterbatasan infrastruktur dan kurangnya dukungan bagi pengembangan usaha seperti program pelatihan dan akses permodalan yang memadai turut menghambat pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja.

Selain itu, sektor industri pengolahan yang belum dikembangkan secara maksimal dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera juga mempersempit peluang bagi para pelaku usaha untuk mengakses kredit modal

kerja dalam nominal yang lebih besar. Oleh karena itu, adanya kesenjangan tersebut, nilai kredit modal kerja yang disalurkan di Bengkulu cenderung lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera.

Ketidakmerataan distribusi kredit modal kerja antarprovinsi tercermin dalam data pembiayaan perbankan selama periode 2017–2024. Di Pulau Sumatera, disparitas nilai kredit modal kerja ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi ekonomi serta tingkat perkembangan infrastruktur sektor industri di masing-masing daerah. Wilayah seperti Medan di Sumatera Utara mencatat penyaluran kredit yang jauh lebih tinggi, didorong oleh kemudahan akses terhadap pasar yang lebih luas, besarnya jumlah pelaku usaha, kuatnya dukungan institusi perbankan, serta pesatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan. Sebaliknya, daerah seperti Bengkulu yang perekonomiannya masih bergantung pada sektor pertanian dan, Oleh karena itu perdagangan berskala kecil cenderung membutuhkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih terbatas, sehingga penyerapan kredit modal kerjanya pun relatif rendah. Faktor lain yang turut memperparah kesenjangan ini meliputi keterbatasan infrastruktur perbankan, belum meratanya program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kesenjangan kualitas dukungan dari pemerintah daerah. Akibatnya, sebagian wilayah di Pulau Sumatera memiliki akses yang lebih baik terhadap pembiayaan kredit modal kerja, sementara wilayah lainnya masih menghadapi tantangan dalam mendorong peningkatan penyerapan kredit di sektor tersebut.

Gambar 1.3 Kredit Investasi di Pulau Sumatera 2017-2024



Sumber: Data Bank Indonesia, Statistik Keuangan Daerah

Gambar 1.3 menyajikan gambaran penyaluran kredit investasi di Pulau Sumatera sepanjang periode 2017–2024. Berdasarkan diagram tersebut, Provinsi Sumatera Utara menempati posisi tertinggi dalam hal penyaluran kredit investasi, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat nilai terendah di antara seluruh provinsi yang ada. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan kapasitas investasi antarprovinsi, yang erat kaitannya dengan perbedaan struktur ekonomi serta intensitas aktivitas pembangunan yang berlangsung di masing-masing wilayah..

Sepanjang periode 2017–2024, Provinsi Sumatera Utara secara konsisten mencatat nilai kredit investasi tertinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Tingginya penyaluran kredit investasi di wilayah ini tidak terlepas dari banyaknya proyek investasi jangka panjang yang terkonsentrasi di Sumatera Utara, khususnya

pada sektor industri pengolahan, infrastruktur, perkebunan, dan jasa keuangan, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai tujuan utama para pelaku investasi. Selain itu, kedudukan Sumatera Utara sebagai pusat perekonomian Pulau Sumatera dengan Kota Medan yang berfungsi sebagai sentra perdagangan dan industri turut mendorong tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pengadaan aset tetap, seperti mesin, fasilitas pabrik, maupun pengembangan kawasan industri. Secara nominal, kredit investasi di provinsi ini menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang, yakni meningkat dari Rp52,83 triliun di tahun 2017 hingga mencapai Rp70,71 triliun di tahun 2024., meskipun sempat mengalami fluktuasi pada masa pandemi. Pemulihan kredit investasi pascapandemi pun berjalan relatif baik, seiring dengan meningkatnya kembali aktivitas pembangunan dan ekspansi usaha berskala besar yang didukung oleh kemudahan akses pembiayaan perbankan. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan kapasitas penyerapan kredit investasi terbesar di Pulau Sumatera.

Berbanding terbalik dengan Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mencatat nilai kredit investasi paling rendah di Pulau Sumatera. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menghambat perkembangan pembiayaan investasi di wilayah tersebut. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah minimnya proyek investasi berskala besar di provinsi ini. Struktur perekonomian Bangka Belitung yang masih bertumpu pada sektor pertambangan timah dan perdagangan menjadikan kebutuhan terhadap pembiayaan investasi jangka panjang dalam jumlah besar relatif terbatas, ditambah dengan cakupan wilayah yang tergolong kecil. Meskipun secara nominal kredit investasi di provinsi

ini menunjukkan peningkatan dari Rp2,23 triliun di tahun 2017 hingga mencapai Rp5,83 triliun di tahun 2024, pertumbuhannya masih terkendala oleh rendahnya diversifikasi industri serta kurang berkembangnya sektor-sektor yang memerlukan investasi aset tetap dalam skala besar, seperti infrastruktur dan manufaktur. Keterbatasan inilah yang pada akhirnya menjadi penghambat utama bagi peningkatan penyaluran kredit investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

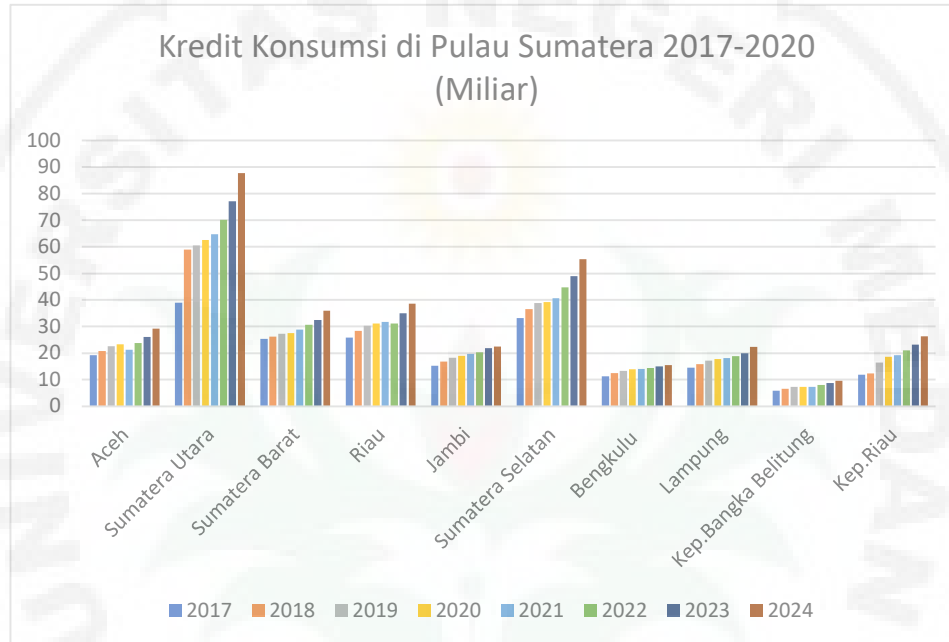
Lebih lanjut, masih kurangnya pengembangan kawasan industri secara optimal di Pulau Sumatera turut mempersempit peluang pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan kredit investasi berskala besar. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya menjadi faktor pendorong rendahnya nilai kredit investasi yang tersalurkan di Kepulauan Bangka Belitung jika disandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera..

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran kredit investasi di Pulau Sumatera selama periode 2017–2024 tidak terdistribusi secara merata antarprovinsi. Ketimpangan ini bersumber dari perbedaan kondisi ekonomi, tingkat perkembangan infrastruktur, serta intensitas proyek pembangunan di masing-masing wilayah. Daerah seperti Medan di Sumatera Utara mencatat penyaluran kredit investasi yang sangat tinggi, didorong oleh kemudahan akses terhadap proyek investasi berskala besar, posisinya sebagai pusat perekonomian regional, kuatnya dukungan institusi perbankan, serta berkembang pesatnya sektor industri pengolahan. Sebaliknya, daerah seperti Kepulauan Bangka Belitung yang struktur ekonominya masih didominasi oleh sektor pertambangan dan perdagangan cenderung memiliki kebutuhan pembiayaan investasi jangka panjang yang lebih

terbatas, seiring dengan rendahnya tingkat diversifikasi industrinya. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh ketidakmerataan ketersediaan proyek pembangunan, program pembiayaan investasi, serta kualitas infrastruktur antarwilayah yang secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan penyaluran kredit investasi. Akibatnya, sebagian provinsi di Pulau Sumatera memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap pembiayaan kredit investasi, sementara provinsi lainnya masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan penyerapan kredit investasi di wilayah mereka.

Sejalan dengan temuan Simbolon et al. (2024), kredit investasi terbukti berpengaruh positif dan bermakna terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menegaskan bahwa kredit investasi memegang fungsi yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Melalui pemanfaatan kredit investasi, pelaku usaha dapat melakukan peremajaan dan peningkatan kapasitas produksi, antara lain dengan mengganti peralatan yang telah usang menggunakan teknologi yang lebih terkini, optimal, berpotensi besar lebih besar, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan output produksi baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Lebih dari itu, kredit investasi juga berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha melalui pembangunan fasilitas produksi baru serta pembiayaan berbagai proyek usaha yang sedang dirintis, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai PDRB dan percepatan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Gambar 1.4 Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Sumatera 2017-2024



Sumber: Data Bank Indonesia, Statistik Keuangan Daerah

Berdasarkan data yang tersaji pada Gambar 1.4 mengenai kredit konsumsi rumah tangga di Pulau Sumatera sepanjang periode 2017–2024, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan menempati posisi terendah di antara seluruh provinsi yang ada. Kesenjangan ini mencerminkan adanya ketidakmerataan daya beli masyarakat serta perbedaan tingkat aktivitas konsumsi antarprovinsi di Pulau Sumatera.

Sepanjang periode 2017–2024, Provinsi Sumatera Utara secara konsisten mencatat nilai kredit konsumsi rumah tangga paling tinggi, sedangkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingginya penyaluran kredit konsumsi di wilayah ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada segmen kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan kredit

multiguna yang berkembang pesat di provinsi tersebut.. Selain itu, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Pulau Sumatera dan memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, khususnya di kawasan Kota Medan dan sekitarnya, sehingga turut mendorong besarnya permintaan terhadap kredit konsumsi. Secara nominal, kredit konsumsi rumah tangga di provinsi ini menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, yakni meningkat dari sekitar Rp39,04 triliun pada periode 2017 meningkat menjadi Rp87,64 triliun pada periode 2024, didukung oleh kemudahan akses pembiayaan perbankan serta tersedianya program kredit yang fleksibel bagi masyarakat. Pemulihan ekonomi pascapandemi juga turut berkontribusi dalam memperkuat daya beli masyarakat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan penyaluran kredit konsumsi rumah tangga di wilayah ini. Keseluruhan faktor tersebut menjadikan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan nilai kredit konsumsi rumah tangga terbesar di Pulau Sumatera.

Berbanding terbalik dengan Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung justru mencatat nilai kredit konsumsi rumah tangga paling rendah di Pulau Sumatera. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menghambat perkembangan pembiayaan konsumsi di wilayah tersebut. Faktor utama yang melatarbelakanginya adalah relatif kecilnya skala ekonomi provinsi ini. Struktur perekonomian Bangka Belitung yang masih bergantung pada sektor pertambangan dan perdagangan dengan pola pendapatan yang cenderung tidak stabil menyebabkan permintaan kredit konsumsi masyarakat menjadi terbatas, seiring dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif lebih rendah. Meskipun secara nominal kredit konsumsi rumah tangga di provinsi ini mengalami peningkatan dari

sekitar Rp5,81 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp9,59 triliun pada tahun 2024, pertumbuhannya masih terkendala oleh terbatasnya aktivitas sektor perdagangan dan jasa, serta kurang tersedianya program pembiayaan konsumsi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berbagai keterbatasan inilah yang pada akhirnya menjadi penghambat utama pertumbuhan distribusi fasilitas kredit konsumsi rumah tangga di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,.

Di samping itu, masih rendahnya tingkat urbanisasi serta belum optimalnya pengembangan lapangan pekerjaan formal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika disandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera turut membatasi kemampuan daya beli masyarakat dalam mengakses kredit konsumsi rumah tangga dalam jumlah yang besar. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya menjadi faktor penyebab rendahnya nilai kredit konsumsi rumah tangga yang tersalurkan di Bangka Belitung apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa penyaluran kredit konsumsi rumah tangga di Pulau Sumatera selama periode 2017–2024 tidak terdistribusi secara merata antarprovinsi. Ketimpangan ini bersumber dari perbedaan tingkat pendapatan masyarakat, besarnya jumlah penduduk, serta tingkat urbanisasi yang bervariasi di masing-masing wilayah. Daerah seperti Medan di Sumatera Utara mencatat penyaluran kredit konsumsi rumah tangga yang sangat tinggi, didukung oleh besarnya jumlah penduduk, tingginya tingkat urbanisasi, kuatnya daya beli masyarakat, serta tersedianya beragam program pembiayaan yang mudah diakses. Sebaliknya, daerah seperti Kepulauan Bangka Belitung yang perekonomiannya

masih bergantung pada sektor pertambangan dengan pola pendapatan yang kurang stabil cenderung memiliki daya beli yang lebih terbatas, sehingga akses masyarakatnya terhadap pembiayaan konsumsi pun relatif rendah. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh perbedaan tingkat pendapatan masyarakat, keterbatasan infrastruktur perbankan, serta belum meratanya ketersediaan lapangan pekerjaan formal antarwilayah, yang secara langsung memengaruhi perkembangan penyaluran kredit konsumsi rumah tangga. Akibatnya, sebagian provinsi di Pulau Sumatera memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap pembiayaan kredit konsumsi rumah tangga, sementara provinsi lainnya masih menghadapi berbagai hambatan dalam upaya meningkatkan penyerapan kredit konsumsi di wilayah mereka.

Berdasarkan berbagai fenomena yang telah dipaparkan mengenai distribusi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi rumah tangga di kawasan Pulau Sumatera tampak adanya ketimpangan yang cukup signifikan antarprovinsi dalam hal akses maupun penyerapan pembiayaan perbankan. Ketimpangan tersebut tidak semata-mata mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan kapasitas produksi di masing-masing wilayah, tetapi juga mengisyaratkan adanya kesenjangan dalam peluang pertumbuhan ekonomi regional yang perlu mendapat perhatian serius. Mengingat besarnya peran kredit perbankan sebagai instrumen pembiayaan dalam menggerakkan aktivitas perekonomian, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan menjadi suatu hal yang sangat krusial dan urgent untuk ditelaah lebih lanjut.

Laratmase et al. (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi secara parsial terbukti memberikan pengaruh yang nyata dan berarti terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa ketiga jenis kredit tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mendorong berjalannya aktivitas perekonomian. Namun demikian, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan kesimpulan yang dicapai oleh Nurjannah dan Nurhayati (2017), yang menemukan bahwa kredit investasi dan kredit modal kerja secara statistik terbukti memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, sementara kredit konsumsi tidak memperlihatkan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Adanya perbedaan hasil antara kedua penelitian tersebut mengindikasikan masih terdapatnya kesenjangan penelitian atau research gap yang memerlukan kajian lebih mendalam dan komprehensif, terutama dalam konteks dinamika perekonomian wilayah di Pulau Sumatera.

Lebih lanjut, data yang bersumber dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penyaluran kredit modal kerja terus diupayakan pengembangannya, distribusi kredit di sejumlah provinsi masih mengalami perlambatan. Proporsi pembiayaan perbankan yang diarahkan kepada segmen UMKM, koperasi, maupun masyarakat berpenghasilan rendah dinilai masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan guna mewujudkan inklusivitas ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai langkah telah ditempuh untuk mengoptimalkan penyaluran kredit di Pulau Sumatera,

pertumbuhan kredit di kawasan tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini berpotensi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, khususnya di provinsi-provinsi yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan pembiayaan perbankan.

Lebih dari itu, ketimpangan distribusi kredit yang terjadi antarprovinsi juga mencerminkan ketidakmerataan dalam pengembangan sektor produktif di masing-masing wilayah. Daerah-daerah yang memiliki akses kredit terbatas umumnya menghadapi hambatan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang pada gilirannya berdampak pada rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran. Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan nominal penyaluran kredit yang tinggi memiliki potensi yang lebih besar untuk mengembangkan sektor industri serta meningkatkan produktivitas perekonomian di tingkat regional.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, tampak bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai sejauh mana dampak kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi rumah tangga terhadap keadaan perekonomian di Pulau Sumatera. Mengingat adanya perbedaan temuan antara penelitian-penelitian terdahulu serta masih berlangsungnya ketimpangan distribusi kredit antarwilayah, diperlukan suatu kajian yang lebih menyeluruh dan komprehensif untuk menganalisis kontribusi ketiga jenis kredit tersebut dalam konteks perekonomian regional. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah secara mendalam dampak kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi rumah tangga terhadap berbagai indikator ekonomi di Pulau

Sumatera, dengan harapan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka mendorong pemerataan akses pembiayaan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, penulis berminat untuk mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Regional Bruto"

1.2 Identifikasi Masalah

1. Terdapat kesenjangan antar provinsi di Pulau Sumatera, dengan PDRB yang jauh lebih tinggi di provinsi besar seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.
2. Penyaluran kredit perbankan, terutama modal kerja dan investasi, belum merata dan cenderung terkonsentrasi di wilayah ekonomi maju.
3. Belum ada bukti empiris mengenai pengaruh masing-masing kategori kredit (modal kerja, investasi, konsumsi rumah tangga) terhadap laju pertumbuhan ekonomi Sumatera selama 2017–2024.
4. Mekanisme transmisi dan efektivitas jenis kredit terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto belum sepenuhnya dipahami, sehingga perlu analisis lebih mendalam.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya mengkaji ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Pulau Sumatera, dengan fokus pada disparitas nilai PDB di beberapa provinsi utama seperti Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

2. Penelitian ini dibatasi pada pengkajian distribusi kredit perbankan yang mencakup kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi rumah tangga di berbagai provinsi yang berada di Pulau Sumatera.
3. Penelitian ini hanya menelaah dampak kredit perbankan terhadap perkembangan perekonomian dalam rentang waktu 2017–2024, termasuk di dalamnya pengaruh situasi pandemi COVID-19 beserta fase pemulihan kondisi ekonomi.
4. Analisis difokuskan pada karakteristik dan mekanisme transmisi ketiga jenis kredit perbankan dalam konteks kontribusinya terhadap peningkatan PDRB di Pulau Sumatera, tanpa mencakup faktor-faktor eksternal lain di luar kredit perbankan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Kredit Modal Kerja Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024?
2. Apakah Kredit Investasi Berpengaruh Terhadap Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024?
3. Apakah Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berpengaruh Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024?
4. Apakah Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menelaah permasalahan yang ada::

1. Untuk mengetahui pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera pada periode 2017–2024
2. Untuk mengetahui pengaruh Kredit Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024
3. Untuk mengetahui pengaruh Kredit Konsumsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera 2017-2024
4. Untuk mengetahui pengaruh Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, serta Kredit Konsumsi Rumah Tangga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera dalam kurun waktu 2017–2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian maka dapat di ambil manfaat dari penelitian ini,yaitu:

1. Manfaat Teoritas
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas pemahaman dalam mengkaji hubungan sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Sumatera, terutama peran kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dengan perluasan variabel (inflasi, tenaga kerja, investasi publik) atau cakupan wilayah ke tingkat nasional.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi masukan perumusan kebijakan ekonomi, terutama pemerataan akses pembiayaan sektor produktif dan UMKM, serta penguatan kebijakan keuangan inklusif untuk pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera.